



MINI MADANI/REPUBLIKA

# Busyro Muqoddas, Ketua KPK Kepemimpinan *Low Profile*

## Apa prioritas pertama jika menjabat ketua KPK?

Konsolidasi ke dalam pihak internal KPK, peningkatan sumber daya manusia, pembenahan struktur organisasi, dan budaya organisasi. Kemudian, bedah kasus dan penguatan sinergi dengan kejaksaan. Itu penting.

## Tentang kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Apakah menurut Anda KPK perlu penyidik independen?

Ini saya kira masih persepsi. Tapi, saya kira dengan pendekatan yang lebih

persuasif yang Insya Allah bisa saya lakukan. Tidak ada masalah penyidik dari kepolisian atau kejaksaan. Yang penting ada transparansi informasi.

## Ada anggapan Busyro terpilih karena akan lebih kompromistis ketimbang Bambang Widjojanto?

Tipikal kepemimpinan saya itu kompromis, ini perlu penjelasan. Siapa pun juga yang punya *style* kepemimpinan dengan penampilan *low profile* itu tidak selalu berkorelasi dengan lemah atau kuat, tegas atau tidaknya seseorang.

Dalam konteks itu, saya tidak akan berkompromi untuk hal-

hal yang menyangkut prinsip-prinsip penegakan hukum. Apalagi ketika penegakan hukum menyangkut kasus-kasus yang merugikan keuangan negara dan keuangan rakyat dalam jumlah yang spektakuler dan besar—ketika rakyat semakin tersayat-sayat rasa keadilannya mengingat putusan jaksa dan hakim terhadap kasus korupsi yang belakangan ini semakin menurun.

Ini fenomena yang semakin merisaukan dan ide untuk membawa obor pembaruan di KPK itu, insya Allah akan saya bawa. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengumumkan, *men-declare*, tidak ada kompromi dalam hal soal penegakan hukum dengan kriteria yang sudah saya sampaikan.

Prinsipnya *equality before the law*. Konsekuensi dari dua asas yang fundamental itu bahwa di dalam hukum ini tidak bisa lagi ada kebijakan yang bersikap diskriminatif diterapkan. Itu tidak bisa itu. Semua fungsinya adalah alat bukti.

## Waktu setahun ini cukup untuk berbuat bagi KPK?

Insya Allah efektif. Tentu saja, tidak sama dengan kalau empat tahun. Memang lebih bagus kalau empat tahun.

## Sampai kapan Indonesia membutuhkan KPK?

Pokoknya selama korupsi-korupsi yang khas Indonesia masih banyak, ya saya kira KPK masih relevan.

## Maksudnya korupsi khas Indonesia?

Ya, yang sistemis menggurita dan mengalami kenaikan intensitas. Upaya KPK sudah terus-

menerus. Pemberantasan itu lebih sulit dari tindakan korupsi. Korupsi itu gampang dan menggenakkan. Misalnya korupsi, setelah itu umrah, terus korupsi lagi. Itu kena enak walaupun dalam tanda kutip itu kenikmatan semu.

## Misalnya, ke depan terjadi sesuatu, KPK tak sejalan dengan Istana, apakah Anda akan tetap mempertahankan posisi KPK?

Kalau sudah di wilayah hukum. Ada fakta hukum didukung dengan bukti-bukti. Itu kendala apa pun juga dan sering kali ada di Indonesia ini, ya sudah kita jalan saja. Soal ada pihak-pihak yang merasa, “*Iho ini kok KPK berseberangan?*” Itu sebenarnya tidak berseberangan. Cuma mengambil jalan sendiri-sendiri. Jalan yang diambil KPK itu jalan yang benar. Benar menurut hukum, benar menurut *common sense*.

## Bagaimana penuntasan kasus Gayus Tambunan dan Bank Century?

Dua kasus itu, terutama kasus Gayus Tambunan, menjadi kasus yang spektakuler dan mencolok perhatian masyarakat. Tidak saja karena Gayus itu 68 kali keluar masuk rutan, tapi di balik kasus itu, kalau ada penyuaipan, tentu ada pihak yang menyuaip.

Yang menyuaip itu korporasi atau perseorangan ini perlu dilakukan koordinasi. Saya menghormati bahwa Kapolri sedang melakukan tugas untuk itu. Nanti perlu ada koordinasi dengan Kapolri dan dari hasil itu bisa kita lakukan atau apa yang sesungguhnya nanti bisa dicapai.

Pengambilalihan itu *kan* normatif sudah diatur di undang-

undang. Tapi, pendekatan *take over* perlu cara elegan.

Sama dengan kasus Bank Century. Sebagai orang baru, bukti yang ada kita takar kembali. Profesional ukurannya, jelas, dan transparan, tak ada agenda politik apa pun juga. Kelemahannya *kan* kita belum tahu konkretnya. Itulah yang jelas dan saya harus sabar dan banyak bertanya. Publik punya hak untuk mengetahui transparansi terkait kasus Gayus dan Century. Jangan sampai masyarakat apatis pada lembaga penegak hukum.

## Langkah konkret sebagai ketua KPK sebulan ke depan?

Saya tidak akan mudah membuat target sebulan pertama. Kasus Gayus selesai, Century selesai, saya tidak berani dan saya tidak mungkin membuat *statement* yang menjadi target. Karena, itu akan menjadi *statement* yang tidak terukur. Kalau tidak terukur, *statement* saya jadi tidak profesional. Saya ingin bekerja profesional.

Saya menetapkan tiga poin bagi KPK. Pertama, tidak melakukan langkah-langkah yang mengakibatkan integritas diri saya dan teman-teman di sana mengalami degradasi dan dengan demikian mengalami delegitimasi. Delegitimasi pada pimpinan KPK itu akan berakibat delegitimasi terhadap institusinya. Jadi, harus dijaga dengan sangat ketat.

Poin kedua, menghindarkan langkah-langkah yang dapat menghambat proses-proses kewenangan dan tugas KPK. Apa pun juga wujudnya. Poin ketiga, tidak melakukan sesuatu yang nanti bisa melanggar substansi atau sumpah janji jabatan.

■ ed: stevy Maradona

## BASRIEF LEBIH ..... hlm 1

Hal senada diungkapkan pengamat kejaksaan M Ali Zaidan. Mantan anggota Komisi Kejaksaan ini juga menilai pertimbangan Presiden memilih Basrief untuk menghindari hambatan psikologis bila jaksa agung diambil dari internal atau eksternal.

“Kalau diambil dari eksternal akan mengalami hambatan psikologis dari pihak internal. Begitu pula jika dari internal akan berhadapan dengan eksternal,” ujar Zaidan.

Oleh karena itu, kata Zaidan, pemilihan Basrief pun menjadi tepat karena ia merupakan jaksa karier yang sudah pensiun dan sudah berkarier di luar selama beberapa tahun. Menurutnya, Basrief tidak akan memunculkan perpecahan di tubuh Kejaksaan Agung karena pernah meniti karier dari bawah dan kiprahnya dapat diterima masyarakat.

Basrief hanya terganjal isu usia. Dalam penjelasan UU 16/2004 tentang Kejaksaan, usia pensiun jaksa 62 tahun. Basrief, kelahiran Tanjung Enim, 23 Januari 1947, sebentar lagi berusia 64 tahun. Basrief pensiun sebagai wakil jaksa agung pada 2007 lalu.

Namun, Irman menilai, walau Basrief sudah pensiun tetap dapat diajukan sebagai jaksa agung. Sesuai dengan Pasal 9 UU Kejaksaan, syarat menjadi jaksa agung adalah sehat jasmani dan rohani.

“Tidak masalah. Jaksa agung tidak harus dari jaksa aktif. Tidak ada batasan umur selama dia masih mampu secara fisik,” kata Irman.

Irman menjelaskan, pemilihan jaksa agung adalah wewenang presiden. Sama halnya seperti menteri, seorang jaksa tidak ada batas umur karena jaksa agung bukan pegawai negeri atau jaksa karier.

Zaidan juga mengingatkan, jaksa agung bukanlah jabatan karier seperti panglima TNI atau kapolri, sehingga usia tak menjadi masalah utama. “Jaksa agung bukan jabatan karier. Tidak seperti jaksa yang pensiun 62 tahun, jaksa agung tidak.”

Zaidan juga tidak meragukan vitalitas Basrief untuk memimpin Korps Adhyaksa di usianya yang sudah senja. Sepengetahuannya, tidak ada masalah dengan kesehatan Basrief.

Mantan menteri kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang berhasil menurunkan Hendarman tak mau mengomentari masalah usia Basrief. Namun, Yusril punya pandangan positif terhadap Basrief. “Beliau jaksa karier yang mempunyai reputasi baik dan wawasan akademik yang baik pula.”

Karena sudah pensiun dan aktif di luar Kejaksaan, Basrief yang kini masuk lagi ke dalam sistem diharapkan Yusril bisa merenung dan melihat keadaan lebih objektif. Dengan dasar itu, Basrief dinilai bisa melakukan pembenahan internal Kejaksaan Agung. “Dia bisa langsung bekerja tanpa banyak berpikir lagi,” kata Yusril.

Basrief akan dilantik Jumat (26/11) ini bersamaan dengan pengangkatan ketua dan anggota Komisi Kejaksaan. Salah satu referensi Presiden mengangkat Basrief adalah jenjang kariernya di Kejaksaan Agung.

Dia pernah mengemban beberapa jabatan penting, seperti kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, jaksa agung muda intelijen, dan wakil jaksa agung 2005 sampai 2007. Basrief juga pernah memimpin tim terpadu yang dikenal dengan nama Tim Pemburu Koruptor. Dia juga menjadi anggota panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencari pengganti Antasari Azhar.

Presiden berharap Jaksa Agung bisa bekerja sama dengan Komisi Kejaksaan. “Untuk memastikan jajaran Kejaksaan Agung terus melakukan reformasi dan penegakan hukum sebaik-baiknya dan hasilnya memenuhi harapan rakyat,” kata Presiden dalam jumpa pers di Kantor Presiden, didampingi Wakil Presiden Boediono.

■ m ikhsan shiddiegy/antara  
 ed: rahmad budi harto

## KALEM TAPI ..... hlm 1

Begitulah keakraban sang ketua yang dirasakan Sukoco. Walau bertindak sebagai ketua, Busyro dipandang selalu menghargai bawahannya. “Dia menjalankan kepemimpinan secara kolejial. Dia tidak egois dan selalu mendengarkan pendapat bawahannya,” tuturnya.

Tapi, di balik kehangatan dan sifat kalemnya, ungkap Sukoco, Busyro menyimpan watak keras dan tak pandang bulu. Tampilan kalem Busyro sama sekali tidak tampak kala menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua KY.

Ini tecermin ketika pria kelahiran Yogyakarta 17 Juli 1952 itu menangani kasus suap yang melibatkan hakim perkaranya mafia pajak Gayus Tambunan, Muhtadi Asnun. Gayus divonis bebas oleh Asnun dalam perkara pajak di Pengadilan Negeri Tangerang. Belakangan Asnun di-

ketahui menerima suap puluhan ribu dolar AS dari Gayus.

KY bertindak cepat dengan memutuskan Asnun melanggar kode etik hakim. Hukumannya tegas dan jelas. Busyro dan rekan-rekan di KY merekomendasikan agar Mahkamah Agung memecat Asnun dengan tidak hormat. “Kalau dilihat dari kesehariannya memang kalem, tapi kalau urusan tugas dia sangat keras dan disiplin,” ujar Sukoco. Karena itu, Sukoco pun tak heran jika pada akhirnya sang atasan terpilih sebagai ketua KPK.

Dia memandang masa depan pemberantasan korupsi akan cerah dengan terpilihnya si kalem berwatak keras ini. “Dia orangnya lurus dan tidak macam-macam. Kebersihan batinnya nomor satu. Jabatan ketua KPK sangat cocok baginya.”

## KORSEL BAKAL ..... hlm 1

ancaman asimetris Korut,” kata Hong, seperti dikutip BBC, Kamis (25/11).

Kebijakan yang berlaku selama ini tak lebih untuk mencegah agar perang tidak meluas. Seorang juru bicara Pemerintah Korsel mengatakan, sistem respons militer baru akan diterapkan dalam level yang bervariasi, tergantung apakah Korut menyerang sasaran militer saja atau juga tempat sipil.

Saat ini sekitar 4.000 tentara Korsel berada di lima pulau yang berbatasan dengan Korut di Laut Kuning. Pulau Yeonpyeong yang menjadi sasaran tembakan meriam Korut hanya berjarak 11 kilometer dari lepas pantai Korut. Serangan artileri terhadap Yeonpyeong tak hanya menyebabkan kerusakan pada instalasi militer, tetapi juga permukiman penduduk.

Sejak insiden tenggelamnya kapal korvet Cheonan di Laut Kuning yang menewaskan 46 awaknya Maret lalu, diduga ditorpedo kapal selam Korut, hubungan kedua negara memanas. Saat itu Korsel hanya melontarkan protes

ke Korut. Dalam insiden Yeonpyeong, Korsel hanya menjanjikan suatu ‘pembalasan masif’, tetapi bersikap hati-hati sehingga tak jelas langkah militer apa yang akan diambil.

Kini Pemerintah Korsel menghadapi tekanan keras dari warganya agar merespons aksi Korut lebih keras. Tekanan terutama datang dari kaum muda yang tak pernah mengalami pahitnya tiga tahun Perang Korea yang hanya berakhir dengan gencatan senjata tahun 1953 itu. Kaum muda yang dibesarkan pada masa jaya ekonomi Korsel itu frustrasi pada sikap pemerintah yang tak berani melakukan aksi pembalasan militer terhadap Korut.

“Dibandingkan dengan masa Perang Korea, kita tidak lagi ketinggalan dari Korut di bidang kemampuan militer,” kata Kang Chun-mo (36 tahun), karyawan sebuah grup bisnis terkemuka di Seoul. “Tapi, pemerintah kami tampaknya merespons dengan takut. Pemerintah sudah *ngomong* soal ‘pembalasan’, tapi melihat kasus

Siapa sebenarnya Busyro? Pria lulusan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1977 ini latar belakangnya kental dengan dunia pendidikan. Ia mengawali kariernya di bidang hukum ketika menjadi direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII pada 1983.

Kolega Busyro di kampus ini, sekarang juga menduduki sejumlah kursi penting di bidang hukum. Sebut saja Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Idris Kasim, dan pelaksana tugas Jaksa Agung Darmono.

Penikmat buku dan olahraganya ini lantas didaulat menjadi Dekan FH UII pada 1999. Setelah kemudian, Busyro masuk jadi anggota Dewan Etik Indonesia Court Monitoring. Pada 2005 ia dipercaya menjadi ketua Komisi Yudisial. Tahun lalu Busyro menerima anugerah Bung Hatta Anti-Corruption Award.

Rekan-rekannya di KY maupun UII mengenal Busyro sebagai sosok yang sederhana. Ia tak doyan olahraga elite, seperti golf. Ia juga ogah duduk di kelas bisnis bila naik pesawat. Maunya selalu di kelas ekonomi.

Mobil dinasnya yang mewah, sedan Toyota Camry, kerap mengganggu karena Busyro lebih memilih naik mobil Kijangnya. Di kampus pun Busyro lebih doyan mengendarai motor.

Busyro tumbuh di lingkungan Muhammadiyah. Ibunya seorang guru agama Islam di Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah, Yogyakarta. Sekolah hingga aktivitas keremajaan ayah tiga putri ini tak lepas dari Muhammadiyah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap, Busyro mampu mengemban amanah besar dalam usaha pemberantasan korupsi. ICW dapat menerima figur Busyro.

## ..... hlm 1

menyelenggarakan latihan perang itu dibuat dalam pembicaraan telepon antara Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri Korsel Kim Sung-hwan, Selasa lalu. “Kami sepakat bahwa melalui latihan perang ini kami bisa mengirim pesan yang jelas kepada Korut,” kata seorang juru bicara Pemerintah Korsel.

Beijing sejak Agustus lalu telah mengkritik kebijakan AS yang sering mengirim kapal induk USS George Washington ke Laut Kuning karena dapat mengganggu hubungan Cina dan AS serta memancing aksi provokasi baru. “Kami mengkhawatirkan soal latihan perang itu,” kata Hong Lei, juru bicara Pemerintah Cina.

Korut tampaknya juga tak terlalu terpengaruh dengan pengerahan armada kapal induk AS. Kantor berita Korut KCNA mengutip pihak militer yang menyatakan kesiapan untuk kembali melakukan serangan ke Korsel. “(Korut) akan melakukan serangan kedua dan bahkan ketiga tanpa ragu-ragu jika penghasut perang di Korsel membuat provokasi militer sem-

Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah, Busyro salah satu calon terbaik. ICW berharap Busyro menepati janji-janji yang ia ucapkan saat uji kelayakan dan keputatan di depan DPR, Rabu lalu.

Beban berat kini ada di pundak Busyro. Inilah sebabnya ketika mengetahui terpilih menjadi ketua KPK lewat voting DPR, kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah ucapan bersyukur, alhamdulillah. Melainkan “Innalillah wa inailaihi rojuin. Ini buat saya bukan apa pun, tapi amanat yang berat,” ujar Busyro.

“Saya tidak mengucapkan ‘alhamdulillah’ tetapi hanya mengucapkan ‘inalillah wa inailaihi rojuin’. Konteksnya bukan orang mati, tapi setiap peristiwa atau kejadian harus dipertanggungjawabkan. Ada amanat besar,” sambung dia.

■ ed: stevy Maradona

brono lagi,” katanya. Sebelum insiden Yeonpyeong, militer Korsel memang melakukan latihan rutin di dekat pulau itu.

Perdana Menteri Cina Wen Jiabao yang sedang berada di Moskow menyebut perkembangan di Semenanjung Korea sangat kompleks dan suram. “Cina berupaya mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan menentang setiap aksi militer,” kata Wen. Kini Cina mendapat tekanan dari sejumlah negara agar menekan Korut untuk menahan diri guna meredakan ketegangan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga khawatir konflik Korea bisa berkembang lebih besar. “Saya harus mengatakan bahwa situasi itu membahayakan dan kalau berlanjut bisa memicu konflik yang besar dan perang baru, bisa meluas, bukan mustahil bisa melibatkan negara lain,” kata Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, kemarin. Dunia internasional, kata Presiden, harus mencegah hal itu. ■ ap/reuters/m ikhsan shiddiegy  
 ed: rahmad budi harto